

KH Amin Ma'ruf Tinjau Pasar Johar Semarang

SEMARANG (KR) - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah Kamis (28/12). Salah satu lokasi kunjungan ke Pasar Johar Semarang, untuk meninjau harga bahan pokok. Dalam dialog dengan pembeli dan pedagang, Wapres mendapatkan laporan kalau sejumlah barang mengalami kenaikan harga menjelang tahun baru 2024.

Selain itu Wapres juga mengunjungi Rumah Pelita, Jl. Candi Pawon Timur III, Manyaran, Candang.

Di tempat tersebut, Wapres meninjau inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target penurunan stunting melalui program daycare. Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, tampak men-



KR-Rini Suryati

Wapres KH Ma'ruf Amin ketika meninjau Pasar Johar Semarang.

dampingi Wapres pada kunjungan kerja kali ini, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Suprayoga

Hadi, Deputy Bidang Administrasi Sapto Harjono WS, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun.

(Ati)-f

Ganjar Akan Menambah Kuota Pupuk Subsidi

SEMARANG (KR) - Calon Presiden (Capres) 2024 Ganjar Pranowo menyatakan sangat prihatin dengan nasib para petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat musim tanah. Kesulitan tersebut akibat kurangnya kuota pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh pemerintah. Ganjar Pranowo mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Kamis (28/12). Menurut Ganjar, petani harus dipermudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat musim tanah.

Untuk itu

kuota pupuk bersubsidi harus ditambah disesuaikan dengan kebutuhan petani. Ganjar Pranowo menegaskan penambahan pupuk bersubsidi akan menjadi prioritas pemerintahan ke depan. Kuota pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan petani agar petani bisa dengan mudah mendapatkan pupuk. "Selama ini banyak petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi karena kuota yang dikurangi. Pemerintah harus menambah kuota pupuk bersubsidi," tutur Ganjar.



KR-Budiono

Capres Ganjar Pranowo berdialog dengan petani di Sukoharjo.

Eks Sambungan hal 1

Umum (JPU) Kejati DIY Toni Wibisono SH MH yang meminta mejelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan serta pidana denda Rp 300 juta dan bila tidak dibayar diganti kurungan penjara 3 bulan, Selasa (21/11) lalu di Pengadilan Tipikor PN Yogyakarta.

Agus dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas putusan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya, Layung Purnomo SH MH CIL menyatakan pikir-pikir. "Kami akan konsultasi dulu untuk langkah hukum selanjutnya," ujarnya

Seperti diketahui Agus Santoso terjerat perkara tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di

Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Awalnya saksi Denizar Rahman Pratama, Direktur PT Deztama Putri Sentosa (PT DPS) mengajukan proposal pembangunan Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama 'Eco-Lodge' kepada Kepala Desa Caturtunggal.

Hingga kemudian Desember 2015 terdakwa AS menghadiri rapat dengan PT DPS membahas sewa menyewa tanah kas desa. "Saat pembahasan disebutkan, biaya kegiatan pembangunan mencapai Rp 4 miliar lebih. Sesuai *site plan*, rumah singgah hijau itu dibangun 48 unit *green lodge*," terang JPU saat membacakan tuntutan. Dalam kasus ini, AS diduga merugikan keuangan negara Rp 2,9 miliar. Ia selaku lurah dianggap melakukan pembiaran terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah desa yang dilakukan PT DPS.

(Vin)-f

Surplus Sambungan hal 1

disebut dengan bias konfirmasi.

Di saat yang sama, informasi lain meski benar, tetapi jika tidak sesuai dengan opini semula, maka akan ditampilkan. Sangat sulit bagi orang yang seperti ini untuk berpindah pendirian. Apesnya, opini awal yang terbentuk pun tidak selalu yang benar.

Informasi apa pun yang diberikan orang bercerita baik dan mempunyai tautan emosional baik juga serupa : lebih mudah dipercaya, meski tidak benar dan berlawanan dengan akal sehat. Kerumitan bertambah, ketika banyak pihak yang saling mengklaim sebagai otoritas yang bisa dipercaya. Dalam konstelasi ini, para pihak tersebut termasuk ahli dengan beragam argumen dan segenap khalayak, terutama wartawan.

Kekhawatiran di atas akan menemukan banyak bukti di musim kontestasi politik seperti saat ini. Coba simak beberapa informasi yang beredar di dunia maya berikut : 'Polisi Temukan Gudang Penyimpanan Ijazah Palsu Gibran; Mahfud MD Laporkan Gibran Rakabuming Raka ke KPU'; eMendag Zulkifli Hasan Ditangkap Karena Penistaan Agama'; eRektor UGM Mengeluarkan Gielbran Muhammad Noor atas Aksi Mengkritik Presiden Jokowi

dan lainnya. Semua informasi tersebut dipastikan merupakan hoaks. Situs www.kominfo.go.id sudah menanyakan klarifikasi untuk setiapnya. Bisa jadi, ketika suhu politik semakin menghangat, produksi hoaks juga meningkat. Baik dengan memoles pasangan jagoan atau memfitnah pasangan lawan.

Apa yang terjadi jika hoaks tersebut terus menyebar dan dipercaya oleh semakin banyak orang? Beragam skenario bisa dibayangkan, termasuk suhu politik yang semakin memanas. Bukan karena adu gagasan bernas, tetapi benturan keganasan culas. Semuanya tidak ada yang berakhir indah.

Dalam konteks politik, fenomena di atas telah melahirkan yang oleh William Davies dalam bukunya Nervous State disebut sebagai 'demokrasi perasaan' (*democracy of feelings*), ketika perasaan semakin mendominasi keputusan manusia. Fakta dimanipulasi untuk memberikan dampak emosional yang maksimum, dan perasaan dimainkan untuk menavigasi perubahan yang sangat cepat.

Bagi Davies, dalam situasi seperti ini, tantangan terbesarnya bukan lagi pada penghormatan kepada kebenaran, karena kebenaran

sudah menjadi isu politik. Kebenaran dibuat menjadi relatif dan diputarbalikkan. Alih-alih digunakan untuk resolusi konflik, kebenaran justru digunakan untuk memperuncing konflik.

Informasi yang beredar pun, termasuk hoaks, dianggap sebagai representasi kebenaran. Kecepatan sebaran informasi tersebut semakin dahsyat ketika terjadi di pusran publik dengan imajinasi paranoid yang tinggi karena perasaan terancam, kesesuaian informasi dengan opini awal yang dimiliki, dan frekuensi informasi yang diterima.

Jika ini yang terjadi dalam konteks perhelatan politik, kebebasan warga dapat direnggut dengan manipulasi dan penggiringan opini. Sehingga akal sehat menjadi sulit untuk berfungsi. Di sini, terjadi surplus informasi yang dibarengi dengan defisit penalaran yang akut.

Bagaimana melawannya? Diperlukan gerakan bersama-sama mengedepankan penalaran merdeka yang tidak dikendalikan perasaan tuna nurani. Semuanya penting dilakukan untuk merawat kewarasan kolektif sebagai bangsa. (*Penulis adalah dosen Jurusan Informatika dan Rektor Universitas Islam Indonesia*)-f

DIORAMA ARSIP JOGJA Belajar Sejarah dalam Kemasan Teknologi

YOGYA (KR) - Belajar sejarah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui Diorama Arsip Jogja, Gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY, Jalan Wonorejo, Banguntapan, Bantul.

"Diorama Arsip Jogja ini merupakan diorama yang bercerita tentang sejarah berdirinya Yogya sampai Yogya menjadi istimewa," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Dra Monika Nur Lastiyani.

Ada 18 ruangan dalam satu lantai dibuat diorama dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 430 tahun sejak berdirinya Yogya sampai Yogya menjadi istimewa. Diorama itu dikemas menjadi tontonan yang apik, menarik, cantik karena di dalamnya full dengan teknologi digital.

Diorama Arsip Jogja ini terbuka untuk masyarakat, dan sudah mulai berbayar sejak November tahun 2022. "Saya yakin anak-anak muda pasti akan tertarik untuk datang, karena kami menggunakan teknologi terkini seperti teknologi *augmented reality* yang bisa diunduh di HP," katanya.

Dikatakan, kalau kita bicara tentang sejarah kadang orang akan melihat bahwa sejarah itu tidak menarik. Tapi berbeda dengan Diorama Arsip Jogja. "Kami bicara sejarah tentang berdirinya Yogya sampai dengan saat ini, dan boleh kami katakan bahwa diorama ini laris manis," katanya.

Sejak diorama ini dibuka untuk masyarakat umum pengunjungnya sudah mencapai hampir 50.000 orang, dan 80 persen adalah anak-anak muda yang sebenarnya tidak menyukai sejarah. "Tapi begitu masuk ke diorama ini, mereka begitu antusias, bahkan



KR-Wawan Isnawan

Dra Monika Nur Lastiyani

mereka membuat konten di media sosial yang berbicara tentang sejarah Yogya," katanya pula.

Menurut Monika, ini menunjukkan bahwasannya sekarang masyarakat sudah mulai memiliki keinginan untuk belajar sejarah. Ketika menyaksikan diorama ini, sebenarnya mereka tidak murni ingin belajar. Tapi dengan melihat diorama ini, maka otomatis mereka menjadi belajar.

"Belajar dalam waktu singkat tentang sejarah Yogya, mulai berdiri sampai dengan menjadi istimewa hanya dalam waktu 90 menit di 18 ruangan," jelasnya.

Dikatakan pula banyak warga masyarakat yang saat ini mungkin belum begitu tahu atau paham bahwa Yogya pernah menjadi Ibukota Republik dari tahun 1946 sampai 1949. Arsip yang terhimpun pada saat Yogya menjadi Ibukota Republik itu dipilih dan dipilih menjadi sebuah cerita menarik.

Untuk mendukung bahwa Yogya pernah menjadi Ibukota Republik, maka arsip-arsip tentang Yogya sebagai Ibukota Republik ini didaftarkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk ditetap-

kan menjadi memori kolektif bangsa dengan judul Yogya sebagai Ibukota Republik, dan ini sudah disetujui oleh dewan pakar. "Sertifikat Yogya Ibukota Republik sebagai memori kolektif bangsa itu sudah kami dapatkan di tahun 2022," kata Monika.

Diorama Arsip Jogja bisa dinikmati oleh masyarakat menjadi sebuah cerita sejarah berdasarkan arsip, sehingga autentikasinya benar-benar terjamin. "Kami tidak menyalakan hal lain selain arsip yang kami miliki sebagai bukti potensi sebuah peristiwa sejarah," jelas Monika.

Untuk memperingati peristiwa sejarah Yogya Ibukota Republik, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menggelar Sinau Sejarah Keistimewaan DIY, '4 Januari, Yogya Ibukota Republik'.

Acara ini akan digelar Kamis (4/1), pukul 09.00-13.00 di Aula SMA Negeri 11, Jalan AM Sangaji No 50, Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Yogya.

Sinau Sejarah diawali pemutaran video dokumenter '1946-1949 Yogya Ibukota Republik'. Dilanjutkan dialog keistimewaan 'Yogya Ibukota Republik' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Baha Uddin MHum (Sejarawan UGM), Dra Monika Nur Lastiyani (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY), Abimanyu Ridzki Putra Wardani (Siswa SMA Negeri 11) dan Wiji Rachmadani (Moderator).

Acara yang akan dipandu Gundhissos ini menampilkan tari dan grup band siswa SMA Negeri 11 dengan bintang tamu Refresh Acoustic. (Wan)

Pj Gubernur Sambungan hal 1

dilakukan arak-arakan, dengan memanggul peti jenazah. "Warga meminta agar jenazah almarhum itu, dibawa sendiri oleh masyarakat," ungkapnya.

Tetapi, kata Kombes Benny, saat arak-arakan dilakukan, terjadi aksi pelemparan-pelemparan oleh beberapa orang peserta arak-arakan.

"Bapak Pj Gubernur terkena lemparan. Pak Kapolda yang ada di situ juga menjadi sasaran. Tetapi dari pengawalan pribadi, langsung mengevaluasi Pak Kapolda sehingga tidak terjadi apa-apa," jelasnya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga membenarkan sempat terjadi keriuhan dari sekelompok masyarakat saat proses arak-arakan

mendiang eks Gubernur Papua Lukas Enembe. "Sempat tadi ada sedikit aksi dari beberapa kelompok masyarakat. Namun, setelah itu bisa diantisipasi," katanya usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai dan peresmian fasilitas baru di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (28/12).

Sigit menyatakan telah meminta seluruh aparat mempersiapkan diri untuk mengamankan proses pemakaman Lukas Enembe. Ia juga meminta jajarannya bisa menjaga situasi di Papua agar tetap terkendali. "Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh aparat di sana, untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga situasi bisa tetap terkendali," ujarnya.

(Ant/Has)-d

Jadi Sambungan hal 1

Retno mengatakan, keberadaan Sumbu Filosofi adalah bukti lestari peradaban Jawa yang berkembang sejak Abad ke-16 hingga saat ini. Sumbu Filosofi merupakan pengejawantahan, perpaduan harmonis elemen budaya benda seperti keris, batik, wayang, dan gamelan, dengan elemen tidak benda. Seperti tradisi, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual upacara, juga dengan nilai-nilai filosofi Jawa.

"Secara resmi saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur DIY dan seluruh masyarakat Yogyakarta. Saya yakin dengan Sertifikat Warisan Dunia UNESCO ini, daya tarik Yogyakarta semakin meningkat dan Keistimewaan Yogyakarta akan semakin kokoh. Saya juga yakin kekayaan ini (Sumbu Filosofi) akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Karena ini warisan budaya yang diakui dunia yang harus *diuri-uri*, dijaga," ungkap Retno.

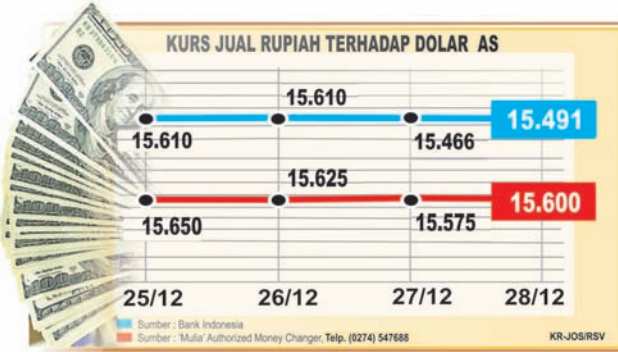
Sedangkan Sultan HB X menyatakan, pascapenetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia, Pemda DIY telah menindaklanjutinya dengan beberapa langkah strategis. Di antaranya

melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, untuk memastikan peran masing-masing, dalam pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Dari sisi regulasi telah terbit Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2023 tentang Sekretariat Ber-

sama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Menurut Sultan, atribut Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sangat dipengaruhi beberapa hal. Seperti tekanan pembangunan, lingkungan, kesiapsiagaan bencana, isu pariwisata berkelanjutan, dan eksistensi sosial-budaya masyarakat sekitar.

(Ria)-f



Prakiraan Cuaca						Jumat, 29 Desember 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	
	Cerah		Berawan		Udara Kabur		Hujan Lokal
							Hujan Petir

Grafis : Arko

Pengaruh SGIE dan Jaminan Produk Halal



Anggrismo, S.E., M.Ec.Dev
Kapodi Ekonomi
Universitas Amikom Yogyakarta

SGIE (State of the Global Islamic Economy) atau SGIER (State of the Global Islamic Economy Report) adalah sebuah laporan yang mengulas berbagai sektor dalam ekonomi Islam di tingkat dunia. DinarStandard, sebuah entitas swasta yang

berbasis di Dubai, bertanggung jawab atas penerbitan laporan ini.

Entitas tersebut secara rutin melakukan penelitian tahunan untuk memantau evolusi sejumlah sektor dalam ekonomi Islam, termasuk Keuangan Islam, Farmasi dan Kosmetik, Fashion, Makanan Halal, Media dan Rekreasi, serta Travel. Harapannya adalah bahwa negara-negara yang merupakan anggota dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) serta negara-negara non-OKI dapat terus mengembangkan industri mereka di sektor-sektor tersebut.

Ada juga berbagai lembaga lain selain DinarStandard, seperti GIFA (Global Islamic Finance

Awards), IFN (Islamic Finance News), IsDB (Islamic Development Bank), ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector), IFSB (Islamic Financial Services Board), dan lain-lain. Sebagai contoh, GIFA yang berpusat di Inggris juga merilis laporan tahunannya yang dikenal sebagai Cambridge GIFR (Global Islamic Finance Report), yang setara dengan SGIER.

Keterlibatan Indonesia dalam SGIE tidak hanya jadi topik dalam debat calon wakil presiden belum lama ini, tetapi juga harus direalisasikan dalam bentuk nyata melalui semangat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi, dalam pengumuman yang dibuat oleh DinarStandard di Dubai, pada hari Selasa (26/12/2023), Indonesia berhasil naik ke posisi tiga besar dalam Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI) menurut Laporan SGIE 2023. Indonesia, yang sebelumnya berada di posisi keempat pada tahun 2022, kini berada di peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan bahwa peningkatan peringkat Indonesia menunjukkan usaha yang kuat dalam memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH),

yang merupakan komponen krusial dalam ekonomi syariah. JPH pada dasarnya dirancang untuk memberikan jaminan keamanan kepada setiap umat muslim dalam mengonsumsi produk makanan. Dengan adanya jaminan halal untuk setiap produk yang beredar, masyarakat tidak perlu merasa ragu. Ini karena mereka memiliki kepastian bahwa apa yang mereka konsumsi adalah sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai makanan dan minuman, status halal dan toyyib adalah esensial bagi umat Muslim. Makanan atau minuman yang mengandung unsur keharaman, baik dalam komposisinya (meskipun hanya sedikit) maupun dalam proses pembuatannya, harus

dihindari. Oleh karena itu, aspek keagamaan seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan negara, termasuk dalam bidang bisnis dan perdagangan. Peraturan hukum yang ada harus mengacu pada nilai-nilai keagamaan seperti yang tercantum dalam sila pertama sebagai panduan dan acuan dalam penyusunan peraturan hukum. Sehingga secara praktis, seharusnya setiap peraturan hukum yang dibuat mengandung frasa: "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini berarti bahwa semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal pengaturan tata niaga dan kualitas produk makanan, pemerintah harus

menjamin kebaikan dan kehalalan produk tersebut. Dengan demikian, penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) dapat tercapai sepenuhnya. Pada akhirnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah jaminan dari pemerintah bahwa produk halal tersedia di pasar, serta pembatasan produk haram yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan perlindungan mutlak diperlukan oleh masyarakat.